



Edukasi SAK EMKM untuk Penguatan Tata Kelola Keuangan UMKM Lintas Sektor di Kabupaten Sumedang

Titi Suhartati^{1,a*}, Utami Puji Lestari^{2,a}, Maulida Salmi Utie^{3,a}

^aProgram Studi Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Jl. Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI Depok, Jawa Barat, Indonesia. Kode pos: 16425

*Corresponding Author e-mail: titi.suhartati@akuntansi.pnj.ac.id

Received: August 2026; Revised: August 2026; Published: September 2026

Abstrak: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumedang tersebar di beragam sektor, mencakup kuliner dan olahan pangan, fesyen, kriya, serta jasa, dan sebagian besar berskala mikro. Kajian awal menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), belum memisahkan keuangan usaha dari keuangan rumah tangga, serta belum menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) secara terstruktur. Akibatnya, penetapan harga bersifat intuitif dan akses terhadap pembiayaan formal terbatas. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting tata kelola keuangan UMKM, merancang model edukasi SAK EMKM yang kontekstual dan transferabel antarsektor, serta mengevaluasi capaian pada tahap awal. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Learning* berbasis andragogi dalam lima fase, dengan sasaran 30 pengusaha. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan koordinasi kelembagaan, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif sederhana. Hasil menunjukkan hambatan utama terletak pada identifikasi komponen biaya, bukan pada operasi perhitungannya; biaya bahan bakar, air, listrik, penyusutan peralatan, dan biaya tidak langsung pada usaha jasa belum dipandang sebagai unsur biaya. Temuan ini mendasari pemisahan materi klasifikasi biaya dan kalkulasi HPP menjadi dua sesi. Pelatihan ini menunjukkan capaian awal yang positif, ditandai dengan kenaikan skor kompetensi komposit dari 4,13 menjadi 4,44 dan kepuasan peserta rata-rata 4,55 dari 5. Keterbatasan utama adalah belum tersedianya data keberlanjutan pascaprogram, sehingga ketahanan perilaku pencatatan peserta perlu diukur pada tahap lanjutan.

Kata Kunci: SAK EMKM; tata kelola keuangan; UMKM lintas sektor; harga pokok produksi; laporan keuangan

SAK EMKM Education for Strengthening Cross-Sector MSME Financial Governance in Sumedang Regency

Abstract: Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sumedang Regency span diverse sectors, including culinary and processed food, fashion, crafts, and services, and are predominantly microscale. A preliminary assessment indicates that most cross-sector owners have not applied the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM), have not separated business from household finances, and do not calculate the Cost of Goods Manufactured in a structured manner, resulting in intuitive pricing and limited access to formal financing. This program aims to analyze the existing financial governance of cross-sector MSMEs in Sumedang, design a contextual and cross-sectorally transferable SAK EMKM education model, and evaluate its initial implementation. The method is *Participatory Action Learning* grounded in andragogy across five phases, targeting 30 cross-sector entrepreneurs. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and institutional coordination, then analyzed descriptively, both qualitatively and with simple quantitative methods. Findings indicate that participants' principal barrier lies in identifying cost components rather than performing calculations; fuel, water, electricity, equipment depreciation, and indirect costs in service businesses are not yet regarded as cost elements. This underpinned the separation of cost classification and cost calculation into two sessions. The core trainings showed positive initial outcomes, marked by a rise in the composite competency score from 4.13 to 4.44 and average satisfaction of 4.55 out of 5. The principal limitation is the absence of post-program sustainability data, so the durability of recorded behavior remains to be measured.

Keywords: accounting standards; financial governance; cross-sector MSMEs; cost of goods manufactured; financial statements

How to Cite: Suhartati, T., Lestari, U. P., & Utie, M. S. (2026). Edukasi SAK EMKM untuk Penguatan Tata Kelola Keuangan UMKM Lintas Sektor di Kabupaten Sumedang. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(3), 1211-1225. <https://doi.org/10.36312/linov.v11i3.6462>.



<https://doi.org/10.36312/linov.v11i3.6462>

Copyright© 2026, Suhartati et al

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang yang didominasi oleh usaha berskala mikro dan tersebar pada beragam sektor, mulai dari kuliner dan olahan pangan, fesyen, kriya, hingga jasa (DiskopUKMPP Kabupaten Sumedang, 2024). SNLIK 2025 mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,46% berbanding indeks inklusi 80,51% (OJK & BPS, 2025), dengan kesenjangan yang lebih lebar di perdesaan (59,60% vs 70,89%). Di Sumedang tercatat 44.542 usaha mikro aktif (89,21% pelaku usaha) yang tersebar di lintas bidang usaha. Mayoritas pelaku usaha, tanpa memandang sektor, belum menerapkan SAK EMKM sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018), belum memisahkan keuangan usaha dari keuangan rumah tangga, serta belum menghitung HPP atau harga pokok penjualan secara terstruktur. Kondisi pencampuran keuangan pribadi dan keuangan usaha ini merupakan pola yang berulang pada UMKM di berbagai daerah dan sektor, serta menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak akurat (Watulfa & Fithria, 2025). Permasalahan ini berkaitan erat dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, karena penguatan tata kelola keuangan merupakan prasyarat bagi keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Sejumlah kajian di berbagai wilayah menegaskan bahwa penataan pencatatan berbasis SAK EMKM menjadi titik ungit penting bagi kemandirian finansial UMKM lintas sektor, sehingga masalah serupa lazimnya diselesaikan melalui edukasi dan pendampingan yang terstruktur (Khaddafi et al., 2025; Marliadi et al., 2026; Watulfa & Fithria, 2025).

Ketidakmampuan menghitung harga pokok secara tepat berdampak langsung pada kualitas keputusan penetapan harga di seluruh sektor. Pelaku usaha cenderung menetapkan harga jual berdasarkan perkiraan pribadi tanpa mempertimbangkan perhitungan biaya yang akurat, sehingga peluang memperoleh laba optimal menjadi terbatas (Romadhon et al., 2025; Shafira et al., 2024). Kerentanan ini bersifat lintas sektor dengan wujud yang berbeda-beda: usaha kuliner dan olahan pangan menghadapi fluktuasi harga bahan baku, usaha fesyen dan kriya menghadapi biaya bahan dan tenaga kerja yang bervariasi antarpesanan, sedangkan usaha jasa kerap kesulitan membebankan biaya tidak langsung ke dalam tarif layanannya (Prihastiwi et al., 2026). Industri tahu, misalnya, memikul beban tambahan berupa ketergantungan pada kedelai impor yang harganya berfluktuasi, sehingga penetapan harga yang tidak berbasis data biaya membuat usaha rentan mengalami kerugian tersembunyi. Dengan demikian, kelemahan identifikasi dan pembebanan biaya merupakan persoalan yang dialami UMKM lintas sektor, bukan khas satu komoditas semata. Kelemahan tata kelola keuangan juga membatasi akses pembiayaan formal; tanpa laporan keuangan yang memadai, pengusaha kesulitan memenuhi persyaratan skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kesenjangan antara kondisi mitra dan standar tata kelola yang diharapkan inilah yang menuntut solusi berupa intervensi edukatif yang segera dan terarah.

Meskipun literatur pengabdian mengenai SAK EMKM cukup melimpah, sebagian besar program disusun secara generik sehingga contoh kasus dan satuan perhitungan yang digunakan kerap tidak mencerminkan struktur biaya pada sektor tertentu, atau sebaliknya terlalu terpaku pada satu sektor sehingga sulit dialihkan (Ayem et al., 2024; Pasaribu & Baroroh, 2025). Celah inilah yang hendak diisi oleh kegiatan ini, yaitu merancang satu model edukasi yang dapat melayani UMKM lintas sektor sekaligus. Untuk itu, industri tahu diangkat bukan sebagai fokus program, melainkan sebagai salah satu kasus diagnosis awal karena struktur biayanya khas

dan terukur, mencakup biaya bahan baku dan koagulan, tenaga kerja harian, bahan bakar, serta penyusutan peralatan sederhana, sehingga memudahkan identifikasi pola kesulitan yang bersifat umum. Pola tersebut kemudian digeneralisasi menjadi kerangka edukasi transferabel bagi UMKM di Kabupaten Sumedang, yaitu dengan menetapkan prinsip yang berlaku umum (pemisahan kas, klasifikasi biaya, kalkulasi HPP atau harga pokok penjualan, dan penyusunan laporan), sementara satuan produksi, satuan layanan, dan contoh kasus disesuaikan dengan masing-masing bidang usaha. Kegiatan ini juga tidak berhenti pada pelatihan tunggal, melainkan dilanjutkan dengan praktik mandiri terbimbing serta survei tindak lanjut. Kebaruan pendekatan terletak pada strategi memanfaatkan diagnosis lintas sektor, dengan komposisi peserta didominasi sektor kuliner (86%) dan sektor nonkuliner seperti fesyen, kriya, dan jasa (14%), untuk merancang model yang berlaku bagi seluruh sektor UMKM. Kajian yang dilakukan oleh Rosyidah et al. (2022) menemukan bahwa hambatan kepatuhan SAK EMKM lebih disebabkan kapasitas dan keyakinan pelaku usaha daripada kompleksitas standar.

Tujuan kegiatan ini adalah menganalisis kondisi eksisting tata kelola keuangan UMKM di Kabupaten Sumedang, merancang model edukasi SAK EMKM yang kontekstual dan transferabel antarsektor dengan memanfaatkan diagnosis awal lintas bidang usaha, serta mengevaluasi capaian dan kendala pelaksanaan tahap awal sebagai dasar penyempurnaan pada tahap berikutnya. Secara teoretis, kegiatan ini berkontribusi pada pengembangan model edukasi akuntansi berbasis andragogi yang sensitif terhadap keragaman struktur biaya sektoral. Secara praktis, kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian SDG 8 melalui penguatan kapasitas usaha, serta SDG 17 terkait kemitraan untuk mencapai tujuan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Indikator keberhasilan yang ditelaah meliputi penerapan SAK EMKM, pemisahan keuangan usaha, pengenalan komponen biaya usaha, serta kemampuan menyusun laporan keuangan sederhana pada berbagai bidang usaha.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan dan Desain Kegiatan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan Participatory Action Learning (PAL) berbasis andragogi. Pendekatan partisipatif dipilih karena menempatkan komunitas sebagai aktor aktif pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, bukan sekadar penerima materi (Evelyna et al., 2025). Prinsip dasarnya adalah menghargai pengetahuan dan pengalaman komunitas lokal sebagai modal untuk merumuskan solusi atas persoalan yang mereka hadapi sendiri (Darmawan et al., 2021). Pemilihan pendekatan ini juga didasarkan pada karakteristik sasaran, yaitu pembelajar dewasa yang memiliki pengalaman usaha nyata, sehingga proses pembelajaran diarahkan agar berangkat dari persoalan konkret peserta dan berorientasi pada keterampilan yang dapat langsung diterapkan pada bidang usaha masing-masing. Konsekuensi metodologisnya, materi pelatihan disusun setelah survei lapangan dilakukan, agar contoh kasus, satuan produksi maupun satuan layanan, dan struktur biaya yang digunakan mencerminkan praktik usaha nyata di berbagai sektor, dengan usaha tahu sebagai salah satu kasus rujukan struktur biaya.

Kombinasi metode partisipatif berbasis andragogi dengan pembelajaran berbasis pengalaman melalui kelas intensif dan pendampingan lanjutan telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktis peserta dalam program serupa (Ilham et al., 2026). Suasana pelatihan dirancang terbuka dan tidak menghakimi sehingga peserta bersedia menyampaikan pengalaman, tantangan, dan kegagalan yang pernah dialami dalam mengelola usaha. Personalisasi pembelajaran

semacam ini terbukti meningkatkan retensi dan pemahaman peserta pelatihan UMKM, khususnya ketika kemampuan awal peserta bervariasi (Dwi Handayani et al., 2025).

Waktu, Lokasi, Sasaran, dan Peran Mitra

Pelatihan inti tahap pertama terlaksana pada hari Kamis, 30 Juli 2026 (4 jam efektif, 30 peserta) dengan menggunakan modul “Akuntansi Keuangan Sederhana Berbasis SAK EMKM” yang disusun oleh tim pelaksana. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan lokasi pelatihan di Gedung Sumedang Creative Centre (SCC). Sasaran kegiatan adalah 30 pengusaha UMKM Sumedang lintas sektor yang diseleksi menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (a) menjalankan usaha yang masih aktif pada beragam sektor, mencakup kuliner dan olahan pangan, fesyen, kriya, serta jasa; (b) berskala mikro hingga kecil dengan aset di bawah Rp50 juta atau omzet tahunan di bawah Rp300 juta; (c) belum menerapkan pencatatan keuangan sesuai SAK EMKM; dan (d) bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga tahap pendampingan. Kriteria terakhir ini penting karena efektivitas pendekatan PAL bergantung pada kontinuitas keterlibatan peserta. Keragaman sektor peserta sengaja dipertahankan agar model edukasi diuji langsung pada populasi lintas bidang usaha, bukan pada satu komoditas saja.

Mitra kelembagaan kegiatan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DiskopUKMPP) Kabupaten Sumedang. Mitra berperan sebagai fasilitator kelembagaan melalui pemberian izin dan dukungan pelaksanaan, identifikasi dan koordinasi dengan komunitas sasaran, fasilitasi pertemuan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi terkait, serta penyediaan lokasi pelatihan. Keterlibatan instansi pemerintah daerah memberikan legitimasi kegiatan di mata komunitas sasaran sekaligus membuka peluang keberlanjutan melalui program pembinaan UMKM yang telah berjalan. Tim pelaksana terdiri atas tiga dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta dengan pembagian peran sebagai ketua pelaksana, penanggung jawab perancangan modul dan penyusunan laporan, serta penanggung jawab pelaksanaan dan dokumentasi. Lima mahasiswa dilibatkan sebagai asisten fasilitator yang mendampingi peserta pada sesi latihan dan praktik, sekaligus memperoleh ruang untuk menerapkan pengetahuan akademik dalam konteks nyata.

Ippek yang Ditransfer dan Tahapan Pelaksanaan

Ippek yang ditransfer adalah penerapan SAK EMKM secara kontekstual bagi UMKM lintas sektor, mencakup pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, pencatatan transaksi harian, identifikasi dan klasifikasi biaya produksi maupun biaya jasa, kalkulasi HPP atau harga pokok penjualan dengan metode full costing, penetapan harga jual berbasis HPP, serta penyusunan laporan keuangan SAK EMKM dengan tiga komponen. Industri tahu digunakan sebagai salah satu contoh rujukan struktur biaya, sedangkan latihan bagi peserta sektor lain menggunakan satuan dan komponen biaya sesuai bidang usahanya sendiri. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam lima fase yang saling berurutan, dengan aktivitas, teknik, dan indikator ketercapaian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Fase	Tahapan	Aktivitas Utama	Teknik	Indikator
I	Persiapan	Pembentukan tim, perizinan mitra, survei lapangan, penyusunan	Observasi, wawancara, FGD internal tim	Modul dan rundown tersusun; izin mitra terbit

		modul kontekstual, dan penyusunan rundown		
II	Sosialisasi dan seleksi peserta	Sosialisasi program, rekrutmen dan seleksi 30 peserta, distribusi pre-test baseline	Sosialisasi kelompok, kuesioner	Jumlah peserta terpenuhi; skor pre-test terhimpun
III	Pelatihan inti	Penyampaian materi SAK EMKM, pencatatan transaksi, HPP, laporan keuangan, dan penetapan harga jual	Ceramah interaktif, studi kasus, latihan terstruktur	Kehadiran $\geq 80\%$; lembar kerja sesi terisi
IV	Praktik mandiri terbimbing	Penerapan materi pada usaha peserta disertai klinik konsultasi akuntansi berkala	Pendampingan individual, klinik konsultasi	Portofolio catatan usaha peserta
V	Evaluasi dan pelaporan	Post-test, penilaian portofolio, penerbitan sertifikat, penyusunan laporan dan luaran	Tes tertulis, rubrik penilaian, survei tindak lanjut	Peningkatan skor post-test; laporan keuangan tersusun

Fase I: Persiapan mencakup pembentukan dan koordinasi tim pelaksana, pengurusan izin kegiatan kepada DiskopUKMPP Kabupaten Sumedang, survei lapangan ke sentra UMKM lintas sektor (dengan sentra produksi tahu, sektor kuliner, sebagai salah satu titik pengamatan struktur biaya), penyusunan modul pelatihan, dan penyusunan rundown kegiatan. Survei lapangan dilakukan melalui observasi proses usaha dan wawancara semi-terstruktur untuk mengidentifikasi pola pencatatan yang berjalan, komponen biaya yang dikenali pelaku usaha, serta kendala yang dirasakan pada beragam bidang usaha.

Fase II: Sosialisasi dan Seleksi Peserta meliputi sosialisasi program melalui koordinasi dengan mitra dan seleksi calon peserta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan hingga diperoleh 30 peserta. Seluruh peserta terpilih mengisi pre-test baseline yang mengukur pengetahuan awal SAK EMKM, praktik pencatatan, serta pemahaman terhadap komponen biaya produksi. Hasil pre-test digunakan untuk penyesuaian kedalaman materi sekaligus sebagai data pembandingan pada tahap evaluasi.

Fase III: Pelatihan Inti dilaksanakan dalam enam sesi tematik berdurasi 4 jam. Setiap sesi menggunakan pola konsisten, yaitu pemaparan konsep ringkas, pembahasan studi kasus usaha tahu sebagai contoh dasar yang kemudian diadaptasi ke bidang usaha peserta lain, latihan terbimbing menggunakan data usaha peserta sendiri, dan refleksi bersama. Rincian materi untuk setiap sesi disajikan pada Tabel 2. Enam sesi tematik pada Tabel 2 merupakan rancangan kurikulum lengkap pelatihan inti. Pelaksanaan pada 30 Juli 2026 merupakan sesi pembuka rangkaian tersebut, mencakup tiga materi inti (dasar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, kalkulasi HPP, serta akses pembiayaan KUR) yang dipadatkan dalam satu hari (4 jam efektif) karena keterbatasan waktu peserta pelaku usaha aktif; sesi tematik lainnya akan dilaksanakan pada tahap praktik mandiri terbimbing dan pendampingan lanjutan (Fase IV).

Fase IV: Praktik Mandiri Terbimbing dilakukan setelah pelatihan inti selesai, ketika peserta menerapkan materi pada usaha masing-masing selama periode yang telah ditetapkan. Tim menyelenggarakan klinik konsultasi akuntansi berkala, baik luring di lokasi mitra maupun daring melalui grup komunikasi, untuk menangani kendala teknis. Pendekatan pendampingan lanjutan ini dipilih karena pelatihan

tunggal tanpa tindak lanjut cenderung tidak cukup untuk mengubah kebiasaan pencatatan yang telah lama terbentuk (Khaddafi et al., 2025; Umar et al., 2026).

Fase V: Evaluasi dan Pelaporan mencakup post-test komprehensif, penilaian portofolio laporan keuangan peserta, penerbitan sertifikat pelatihan, serta penyusunan laporan akhir dan seluruh luaran kegiatan.

Tabel 2. Rancangan Materi Pelatihan Inti

Sesi	Topik	Cakupan Materi	Output Sesi
1	Pengenalan SAK EMKM dan tata kelola keuangan usaha	Konsep entitas usaha, ruang lingkup SAK EMKM, manfaat laporan keuangan bagi akses pembiayaan, pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga	Komitmen pemisahan kas usaha
2	Pencatatan transaksi harian	Identifikasi bukti transaksi, buku kas masuk dan keluar, buku pembelian bahan baku (misalnya kedelai pada usaha tahu), buku penjualan	Buku kas harian peserta
3	Identifikasi dan klasifikasi biaya produksi	Biaya bahan baku (contoh: kedelai dan koagulan pada usaha tahu; bahan pangan, kain, atau bahan kriya pada sektor lain), biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead (bahan bakar, air, listrik, penyusutan peralatan)	Daftar komponen biaya usaha
4	Kalkulasi Harga Pokok Produksi	Penyusunan kertas kerja HPP metode full costing, penentuan biaya per satuan produksi sesuai satuan lokal tiap usaha (misalnya per papan/per potong pada usaha tahu, per unit atau per porsi pada sektor lain)	Kertas kerja HPP peserta
5	Penetapan harga jual berbasis HPP	Penentuan margin, simulasi titik impas, analisis sensitivitas terhadap fluktuasi harga bahan baku (misalnya kedelai impor pada usaha tahu)	Simulasi harga jual usaha
6	Penyusunan laporan keuangan SAK EMKM	Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan untuk satu periode	Draf laporan keuangan peserta

Instrumen, Teknik Pengumpulan Data, dan Indikator Keberhasilan

Data pada tahap awal kegiatan dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, observasi langsung terhadap proses usaha pada beberapa sektor, termasuk proses produksi tahu, untuk mengidentifikasi komponen biaya yang secara faktual dikeluarkan oleh pelaku usaha. Kedua, wawancara semi-terstruktur mengenai praktik pencatatan yang berjalan, cara penetapan harga, dan kendala yang dirasakan di berbagai bidang usaha. Ketiga, koordinasi kelembagaan dengan DiskopUKMPP Kabupaten Sumedang untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik populasi sasaran lintas sektor serta program pembinaan yang telah berjalan. Instrumen serta kriteria keberhasilan untuk setiap aspek evaluasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Instrumen dan Kriteria Evaluasi Kegiatan

Aspek	Instrumen	Waktu Pengukuran	Kriteria Keberhasilan
Pengetahuan SAK EMKM	Tes tertulis pre-test dan post-test	Sebelum dan sesudah pelatihan inti	Peningkatan skor rata-rata minimal 30%
Keterampilan kalkulasi HPP	Lembar kerja kalkulasi HPP usaha peserta	Sesi 4 dan praktik mandiri	Minimal 70% peserta menyusun HPP secara lengkap

Kemampuan menyusun laporan keuangan	Rubrik penilaian portofolio laporan keuangan	Akhir praktik mandiri terbimbing	Minimal 60% peserta menghasilkan laporan sesuai SAK EMKM
Kepuasan dan relevansi program	Kuesioner evaluasi peserta	Akhir pelatihan inti	Skor kepuasan rata-rata minimal 4 dari 5
Keberlanjutan penerapan	Survei tindak lanjut	Bulan ke-3 dan ke-6 pascaprogram	Minimal 50% peserta masih mencatat secara rutin

Analisis Data

Data tahap awal dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian dalam bentuk matriks temuan, dan penarikan simpulan yang selanjutnya diterjemahkan menjadi keputusan desain modul. Pada tahap berikutnya, data pre-test dan post-test akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif melalui perbandingan skor rata-rata dan persentase peningkatan, sedangkan portofolio laporan keuangan dinilai menggunakan rubrik yang memuat kelengkapan komponen laporan, ketepatan klasifikasi akun, serta konsistensi angka antarkomponen. Kaitan antara data dan tujuan kegiatan dijaga dengan memetakan setiap temuan pada rumusan permasalahan yang relevan, sehingga hasil analisis dapat langsung digunakan untuk menilai ketercapaian tujuan pengabdian. Sebagai pelengkap evaluasi kualitatif, capaian pelatihan inti dievaluasi dengan desain one-group pretest–posttest. Instrumen pre-test dan post-test masing-masing terdiri atas 20 butir skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju) yang mengukur empat domain kompetensi (kesadaran dan kepatuhan dasar; pencatatan transaksi; penyusunan laporan keuangan; pemanfaatan dan analisis) serta dimensi afektif efikasi diri dan tata kelola.

HASIL DAN DISKUSI

Kondisi Eksisting Tata Kelola Keuangan Mitra

Hasil observasi dan wawancara dengan 30 UMKM pada fase persiapan menunjukkan bahwa persoalan mitra lintas sektor bukan ketiadaan pencatatan sama sekali, melainkan pencatatan yang tidak lengkap dan tidak terklasifikasi. Sebagian pelaku usaha telah mencatat penjualan harian dan pembelian bahan baku, misalnya kedelai pada usaha tahu atau kain pada usaha fesyen, namun catatan tersebut tidak dipelihara secara berkelanjutan dan tidak dikelompokkan berdasarkan jenis biaya. Pola ini berulang secara konsisten pada UMKM Sumedang di sektor kuliner dan olahan pangan, fesyen, kriya, serta jasa yang menjadi peserta pelatihan. Temuan lain yang menentukan adalah bahwa hambatan utama berada pada tahap identifikasi komponen biaya, bukan pada operasi aritmetikanya: biaya bahan baku dan tenaga kerja dikenali dengan baik, tetapi biaya bahan bakar, air, listrik, penyusutan peralatan, serta biaya tidak langsung pada usaha jasa belum dipandang sebagai unsur biaya. Ringkasan temuan survei dan implikasinya bagi rancangan modul disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Temuan Survei Lapangan dan Implikasinya bagi Rancangan Modul

Aspek yang Ditelaah	Kondisi Temuan Lapangan	Implikasi bagi Rancangan Modul
Praktik pencatatan	Pencatatan dilakukan sebagian, umumnya terbatas pada penjualan harian dan pembelian kedelai; tidak terklasifikasi dan tidak berkelanjutan	Materi diarahkan pada penataan pencatatan yang sudah ada, bukan pengenalan pencatatan dari nol
Pengenalan komponen biaya	Biaya bahan baku dan tenaga kerja dikenali; biaya bahan bakar, air, listrik, dan penyusutan peralatan belum	Identifikasi dan klasifikasi biaya dipisahkan menjadi sesi tersendiri (Sesi 3) sebelum kalkulasi HPP (Sesi 4)

	dipandang sebagai unsur biaya produksi	
Satuan produksi	Perhitungan usaha menggunakan satuan lokal (papan dan potong), bukan satuan berat	Seluruh contoh kasus dan kertas kerja disusun dalam satuan papan dan potong
Pemisahan keuangan	Kas usaha dan kas rumah tangga umumnya menyatu dalam satu penyimpanan	Komitmen pemisahan kas ditempatkan sebagai output Sesi 1 agar menjadi prasyarat sesi berikutnya
Siklus kerja harian	Produksi dimulai sejak dini hari sehingga waktu luang peserta terbatas pada siang hari	Durasi sesi dibatasi empat jam dan dijadwalkan di luar puncak produksi

Pola tersebut konsisten dengan temuan pada kegiatan sejenis di berbagai sektor, yang menunjukkan bahwa pelaku usaha kerap belum memahami jenis biaya apa saja yang perlu dimasukkan dalam perhitungan harga pokok, baik pada usaha produksi maupun jasa (Prihastiwi et al., 2026; Rivandi et al., 2025; Romadhon et al., 2025). Dengan demikian, kegagalan perhitungan HPP lebih tepat dipahami sebagai persoalan konseptual mengenai batas biaya, bukan persoalan keterampilan berhitung, dan persoalan ini bersifat lintas sektor. Kerangka ini berbeda dari asumsi umum program pelatihan UMKM yang kerap memposisikan peserta sebagai pihak yang belum mencatat sama sekali, dan justru menegaskan pentingnya diagnosis awal lintas bidang usaha sebelum materi disusun.

Rancangan Model Edukasi yang Kontekstual

Temuan pada Tabel 4 diterjemahkan menjadi tiga keputusan desain. Pertama, materi identifikasi dan klasifikasi biaya dipisahkan menjadi sesi tersendiri (Sesi 3) yang mendahului kalkulasi HPP (Sesi 4), berbeda dari format pelatihan yang langsung menyajikan rumus HPP, karena akar kesulitan peserta berada pada tahap pengenalan komponen biaya. Kedua, seluruh contoh kasus dan kertas kerja disusun menggunakan satuan produksi lokal yang berlaku pada masing-masing usaha, misalnya papan dan potong pada usaha tahu serta unit atau porsi pada sektor lain, untuk menghilangkan beban konversi yang tidak perlu, sehingga peserta dapat langsung menggunakan angka usahanya sendiri. Ketiga, komitmen pemisahan kas ditempatkan sebagai output Sesi 1 dan diperlakukan sebagai prasyarat untuk sesi berikutnya, karena tanpa pemisahan kas, data biaya yang dibutuhkan pada Sesi 3 hingga Sesi 6 tidak akan tersedia.

Secara operasional, satuan produksi atau satuan layanan lokal yang dimaksud disesuaikan per sektor, misalnya satuan porsi, bungkus, loyang, atau papan/potong pada usaha kuliner dan olahan pangan; satuan potong, pesanan, atau ukuran pada usaha fesyen; unit produk, bahan utama, dan tahap finishing pada usaha kriya; serta jam layanan, paket layanan, dan alokasi biaya tidak langsung pada usaha jasa. Contoh konkret per sektor ini memperkuat klaim transferabilitas antarsektor karena menunjukkan bagaimana prinsip yang sama diterjemahkan menjadi satuan kerja yang relevan bagi masing-masing bidang usaha.

Rancangan tersebut juga mempertimbangkan siklus kerja mitra: karena produksi dimulai sejak dini hari, durasi sesi dibatasi hingga 4 jam dan dijadwalkan pada rentang waktu di luar puncak produksi. Penyesuaian ini merupakan penerapan langsung prinsip andragogi, yaitu menyesuaikan penyelenggaraan pembelajaran dengan realitas kehidupan pembelajar dewasa, sekaligus menjadi upaya untuk menjaga tingkat kehadiran hingga akhir rangkaian kegiatan. Pola desain berbasis diagnosis awal semacam ini sejalan dengan praktik terbaik program edukasi akuntansi yang

menempatkan relevansi materi sebagai penentu utama efektivitas pelatihan (Dwi Handayani et al., 2025; Ilham et al., 2026).

Prinsip desain tersebut bersifat transferabel antarsektor dan menjadi inti dari model yang dikembangkan. Meskipun diagnosis awal memanfaatkan industri tahu sebagai salah satu rujukan struktur biaya, tiga keputusan desain yang dihasilkan, yaitu pemisahan materi klasifikasi biaya dari kalkulasi HPP, penggunaan satuan produksi atau satuan layanan lokal, serta penempatan pemisahan kas sebagai prasyarat, tidak bergantung pada karakteristik komoditas tertentu, melainkan pada pola kesulitan yang lazim ditemui pelaku UMKM lintas sektor pada umumnya. Karena itu, model menunjukkan potensi untuk diterapkan pada UMKM Sumedang di berbagai bidang usaha dengan menyesuaikan tiga elemen kontekstual saja, yakni jenis bahan baku atau input yang dominan, satuan produksi atau satuan layanan, serta contoh kasus pada latihan terbimbing, sementara kerangka prinsip dan urutan sesi tetap sama. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan satu pelatihan menampung peserta dari sektor kuliner dan olahan pangan, fesyen, kriya, serta jasa secara bersamaan tanpa kehilangan relevansi bagi masing-masing bidang usaha.

Capaian Pelaksanaan

Capaian kegiatan pada fase persiapan meliputi pelaksanaan pertemuan berkala tim pelaksana; pengiriman surat permohonan izin kepada DiskopUKMPP Kabupaten Sumedang yang telah direspons melalui surat persetujuan; kunjungan survei ke sentra UMKM di Kabupaten Sumedang serta pertemuan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi DiskopUKMPP; penyusunan modul pelatihan SAK EMKM kontekstual industri tahu; pertemuan daring untuk pembahasan teknis pelaksanaan; serta penyusunan rundown kegiatan. Persentase realisasi setiap jenis kegiatan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Persentase Realisasi Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Realisasi
1	Pembentukan tim dan koordinasi berkala tim pelaksana	100%
2	Komunikasi dan pengiriman surat permohonan izin pelaksanaan serta permintaan narasumber eksternal	100%
3	Survei dan pengumpulan data ke lokasi mitra serta koordinasi dengan Kabid dan Kasie DiskopUKMPP	100%
4	Penyusunan modul materi pelatihan	100%
5	Koordinasi daring dengan tim DiskopUKMPP Sumedang	100%
6	Penyusunan rundown kegiatan	100%
7	Sosialisasi program dan seleksi peserta pelatihan (25–30 pengusaha)	100%
8	Pelaksanaan pelatihan inti	100%

Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh butir kegiatan pada fase persiapan dan kegiatan inti telah terealisasi 100%. Selain itu, evaluasi dan pelaporan sudah menunjukkan progres yang dinamis, yaitu post-test sudah dilakukan dan sertifikat peserta sudah dibagikan. Tahapan lanjutan adalah praktik mandiri terbimbing, pendampingan pascapelatihan, penilaian portofolio laporan keuangan peserta, serta survei tindak lanjut pascaprogram akan dilaksanakan secara daring bersama para peserta yang hadir, serta penyusunan laporan akhir.

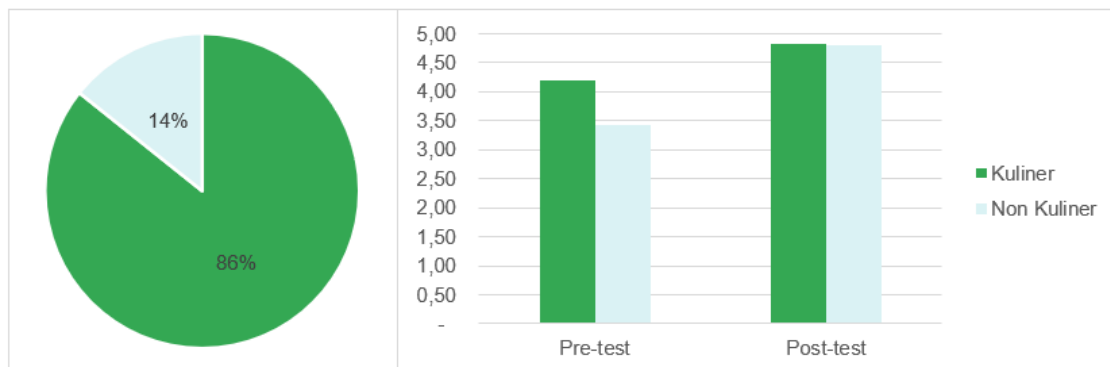


Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Narasumber: (a) Penyusunan Laporan Keuangan; (b) Menghitung HPP; (c) Kredit Usaha Rakyat

Pelaksanaan pelatihan inti diisi dengan tiga materi utama yang relevan dengan standar akuntansi dan tata kelola keuangan (Gambar 1). Kegiatan dimulai dengan materi “Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Sederhana” yang memberikan panduan praktis bagi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dasar yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi “Menghitung Harga Pokok Produksi” membekali peserta dengan kemampuan menghitung komponen biaya produksi secara akurat sebagai dasar penetapan harga jual yang tepat. Materi terakhir tentang “Pengenalan Kredit Usaha Rakyat (KUR)” memperkenalkan skema pembiayaan KUR sebagai alternatif permodalan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Ketiga materi ini merupakan rangkaian yang saling berkesinambungan untuk memperkuat tata kelola keuangan pengusaha UMKM. Ketiga materi ini merupakan bagian dari enam sesi tematik yang dirancang pada Tabel 2; sesi tematik lain akan disampaikan pada tahap praktik mandiri terbimbing dan pendampingan lanjutan.

Selain pemaparan materi oleh tiga narasumber, para peserta diminta untuk mengisi pre-test dan post-test guna mengukur kemampuan peserta terkait tata kelola keuangan. Peserta berjumlah 30 orang dan mencerminkan cakupan UMKM Sumedang lintas sektor. Sekitar 86% bergerak di sektor kuliner/olahan pangan (seperti Rumah Tempe Sumedang, Cireng Kering Bu Momoh, Tape Ketan), sedangkan sisanya bergerak di sektor nonkuliner (fesyen, kriya, dan jasa). Komposisi lintas sektor ini penting karena model edukasi diuji langsung pada populasi dari beragam bidang usaha, alih-alih terbatas pada satu komoditas, sehingga kesesuaian materi dapat dinilai untuk lebih dari satu jenis usaha sekaligus. Meskipun demikian, representasi sektor nonkuliner (14%) masih jauh lebih kecil dibandingkan sektor kuliner (86%), sehingga simpulan mengenai efektivitas model pada sektor nonkuliner perlu dibaca sebagai indikasi awal, bukan kesimpulan yang mapan. Seluruh domain menunjukkan peningkatan secara deskriptif (Tabel 6); peningkatan terbesar justru terjadi pada indikator berskor awal terendah (bukti transaksi, piutang-piutang, laporan posisi keuangan, dan HPP). Kepuasan peserta rata-rata 4,55/5 (Tabel 7), tertinggi pada kepuasan pelaksanaan (4,73) dan relevansi materi (4,65), yang mengindikasikan bahwa materi tetap relevan meskipun peserta berasal dari sektor

yang berbeda. Sebanyak 96,2% berencana mencatat secara rutin, meski ini baru niat, bukan perilaku aktual. Kompetensi yang meningkat berdampak langsung: HPP untuk penetapan harga jual yang rasional, pencatatan utang piutang untuk modal kerja, dan laporan posisi keuangan sebagai prasyarat pengajuan KUR.



Gambar 2. (a) Sebaran Peserta Kuliner vs Nonkuliner; (b) Hasil Pre-test vs Post-test

Tabel 6. Ringkasan Skor per Domain Kompetensi

Domain	Pre M	Post M	Δ%
A. Kesadaran & kepatuhan dasar	4,20	4,52	7,6
B. Pencatatan transaksi	4,09	4,41	7,8
C. Penyusunan laporan keuangan	4,08	4,40	7,8
D. Pemanfaatan dan analisis	4,20	4,46	6,2
E. Efikasi diri dan tata kelola	3,70	4,36	17,8
Komposit (12 indikator inti)	4,13	4,44	7,50

Instrumen pre-test dan post-test masing-masing terdiri atas 20 butir skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju), yang dipetakan menjadi 12 indikator kompetensi inti dalam empat domain (A–D) serta 2 indikator afektif (domain E) agar perbandingan pre–post setara. Skor komposit keseluruhan meningkat dari 4,13 menjadi 4,44. $\Delta\%$ dihitung dengan rumus $\Delta\% = ((\text{Skor Post} - \text{Skor Pre}) / \text{Skor Pre}) \times 100\%$. Enam butir di atas berfokus pada pengetahuan yang diperoleh, relevansi materi, dan niat tindak lanjut. Pada tahap evaluasi berikutnya, instrumen kepuasan disarankan diperluas dengan dimensi yang lebih granular, seperti kejelasan penyampaian narasumber, kegunaan sesi latihan, kecukupan durasi, kualitas fasilitas penyelenggaraan, dan minat mengikuti pendampingan lanjutan, agar evaluasi proses pelatihan lebih komprehensif. Sebagai kelengkapan data pre–post, kepuasan peserta pascapelatihan diukur melalui enam butir khusus pada instrumen post-test, sebagaimana dirangkum pada Tabel 7.

Tabel 7. Kepuasan Peserta terhadap Pelaksanaan Pelatihan (n = 30)

Aspek Kepuasan	Mean	SD	% Skor ≥ 4
Memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat	4,46	0,81	88,5
Materi pelatihan relevan dengan kebutuhan usaha	4,65	0,69	96,2
Berencana menerapkan pencatatan keuangan secara rutin	4,54	0,71	96,2
Berkomitmen menyusun laporan keuangan berkala	4,42	0,70	88,5
Akan merekomendasikan pelatihan kepada UMKM lain	4,50	0,81	88,5
Kepuasan terhadap pelaksanaan pelatihan secara keseluruhan	4,73	0,67	96,2
Komposit kepuasan (6 butir)	4,55	0,65	92,3

Capaian ini layak menjadi praktik baik, yaitu terbangunnya kemitraan kelembagaan dengan pemerintah daerah sebelum pelatihan dimulai, yang mendukung kontribusi kegiatan terhadap SDG 17 mengenai kemitraan. Sebagian

besar luaran belum terealisasi karena secara inheren bergantung pada pelaksanaan pelatihan inti dan pendampingan. Luaran yang paling mendekati penyelesaian adalah modul pelatihan yang tinggal menunggu proses pencetakan dan pengajuan hak cipta. Pola ketergantungan pada luaran pada fase pelaksanaan inti ini lazim ditemukan pada program pengabdian berbasis pelatihan dan pendampingan yang dirancang secara bertahap (Pratiwi et al., 2025).



Gambar 3. (a) Sesi Tanya Jawab Peserta kepada Narasumber; (b) Peserta Mengerjakan Post-test

Kendala Pelaksanaan dan Strategi Penanganan

Kendala yang dihadapi sejauh ini bersifat teknis dan berkaitan dengan penjadwalan, serta sepenuhnya berada di luar kendali substansi program. Pertama, penyesuaian waktu pertemuan koordinasi dengan DiskopUKMPP memerlukan fleksibilitas mengingat padatnya agenda instansi; strategi penanganannya adalah mengombinasikan pertemuan luring dengan koordinasi daring. Kedua, penyesuaian waktu survei lapangan dengan jam operasional pelaku usaha tahu yang sebagian besar mulai memproduksi sejak dini hari; kendala ini ditangani dengan menyesuaikan jadwal kunjungan pada rentang waktu yang tidak mengganggu produksi, yang sekaligus menjadi pertimbangan dalam penetapan jadwal pelatihan. Ketiga, penyusunan modul memerlukan waktu tambahan agar materi benar-benar kontekstual dengan pola biaya produksi industri tahu skala mikro; tambahan waktu ini dipandang sebagai investasi yang diperlukan karena relevansi materi merupakan penentu utama efektivitas pelatihan berbasis andragogi. Keempat, pada pengisian pre-test dan post-test ditemukan delapan respons ganda dan ketidakonsistenan penulisan nama pada formulir evaluasi daring. Data duplikat ditangani dengan mempertahankan respons terakhir per peserta (34 respons post-test menjadi 26 valid), dan pemasangan pre-test dengan post-test diverifikasi melalui pencocokan nama yang dinormalisasi serta silang-periksa nama usaha, menghasilkan 25 pasangan data lengkap dari 29 peserta yang teridentifikasi pada berkas evaluasi (bukan 30, karena satu peserta yang hadir tidak dapat dipasangkan pada kedua instrumen). Skor komposit 4,13 dan 4,44 yang dilaporkan pada Tabel 6 dihitung setelah normalisasi dan pemasangan data tersebut selesai dilakukan. Untuk mengatasi hal ini, pelaksanaan selanjutnya disarankan untuk menggunakan kode peserta yang unik dan pembatasan satu respons per akun. Secara umum, keempat kendala tersebut tidak berdampak secara major pada keseluruhan jadwal program.

KESIMPULAN

Analisis kondisi eksisting menunjukkan bahwa persoalan tata kelola keuangan UMKM lintas sektor di Kabupaten Sumedang tidak terletak pada ketiadaan pencatatan sama sekali, melainkan pada pencatatan yang tidak lengkap dan tidak terklasifikasi, disertai belum dibebankannya biaya bahan bakar, air, listrik, penyusutan peralatan,

serta biaya tidak langsung pada usaha jasa sebagai unsur biaya. Oleh karena itu, hambatan utama peserta bersifat konseptual dan bukan terkait keterampilan berhitung, dan bersifat sama di berbagai sektor. Temuan tersebut melahirkan rancangan model edukasi yang memisahkan materi klasifikasi biaya dari kalkulasi HPP ke dalam dua sesi berbeda, menggunakan satuan produksi atau satuan layanan lokal yang sesuai dengan masing-masing usaha pada seluruh contoh kasus, serta menempatkan komitmen pemisahan kas usaha sebagai prasyarat untuk sesi berikutnya, dan dilengkapi dengan instrumen evaluasi berlapis. Hasil pelaksanaan pelatihan inti (30 Juli 2026, 30 peserta lintas sektor) menunjukkan capaian awal yang positif, dibuktikan dengan skor komposit yang meningkat secara dinamis dari 4,13 menjadi 4,44. Pelaksanaan tahap awal mencapai 100% pada fase persiapan dan pelaksanaan, dengan capaian berupa terbangunnya kemitraan kelembagaan dengan DiskopUKMPP Kabupaten Sumedang, tersusunnya modul kontekstual, serta tersedianya rancangan instrumen evaluasi. Kendala yang muncul bersifat teknis dan penjadwalan serta telah tertangani melalui kombinasi koordinasi luring dan daring tanpa berdampak pada capaian keseluruhan jadwal program. Komposisi peserta lintas sektor, dengan mayoritas kuliner dan olahan pangan serta sebagian fesyen, kriya, dan jasa, menunjukkan bahwa model yang dirancang memiliki potensi untuk diterapkan pada UMKM Sumedang secara lebih luas, meskipun keterwakilan sektor nonkuliner dalam sampel awal ini masih terbatas sehingga generalisasi lintas sektor perlu diuji lebih lanjut.

REKOMENDASI

Kegiatan lanjutan diarahkan pada penuntasan praktik mandiri terbimbing dan pendampingan pascapelatihan bersama mitra, sehingga data empiris keberlanjutan dapat dihimpun untuk menguji ketahanan efektivitas model yang dirancang di luar peningkatan skor sesaat. Pengukuran keberlanjutan pada bulan ketiga dan keenam pascaprogram perlu dilaksanakan secara konsisten, mengingat indikator yang paling bermakna bukanlah peningkatan skor pengetahuan sesaat, melainkan keberlanjutan kebiasaan mencatat setelah pendampingan berakhir. Untuk pengembangan ke depan, integrasi dengan aplikasi pencatatan keuangan sederhana dapat dipertimbangkan setelah peserta menguasai konsep dasar secara manual (Watulfa & Fithria, 2025). Replikasi model pada kabupaten/kota lain maupun pada sektor UMKM yang belum terwakili disarankan disertai survei pendahuluan tersendiri karena struktur biaya, satuan produksi atau satuan layanan, dan pola pencatatan pada setiap sektor berbeda, meskipun kerangka prinsip dan urutan sesi dapat dipertahankan. Penambahan porsi peserta dari sektor fesyen, kriya, dan jasa pada tahap lanjutan juga disarankan agar keterwakilan lintas sektor semakin seimbang. Perlu dicatat bahwa capaian efektivitas pada tahap ini bersifat indikatif karena diukur melalui desain one-group pretest–posttest tanpa kelompok pembandingan, sehingga peningkatan skor tidak dapat sepenuhnya diatribusikan pada intervensi. Data keberlanjutan pascaprogram juga belum tersedia, sehingga ketahanan perilaku pencatatan belum dapat dinilai. Selain itu, keterlibatan peserta bersifat sukarela sehingga berpotensi menimbulkan bias seleksi. Keterbatasan ini menjadi pertimbangan dalam menafsirkan capaian serta merancang tahap selanjutnya. Sejalan dengan kendala respons ganda yang ditemukan, penggunaan kode peserta unik sejak pengisian pre-test dan pembatasan satu respons per akun disarankan untuk seluruh gelombang evaluasi berikutnya. Rekomendasi tambahan mencakup penyusunan dan penampilan contoh kertas kerja HPP lintas sektor sebagai lampiran, penilaian portofolio laporan keuangan peserta menggunakan rubrik terstandar, serta pengukuran proporsi peserta yang

benar-benar memisahkan kas usaha dari kas pribadi tiga bulan pascapelatihan sebagai indikator keberlanjutan perilaku yang lebih kuat daripada sekadar niat.

ACKNOWLEDGMENT

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pimpinan dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Jakarta atas dukungan pendanaan kegiatan melalui skema Pengabdian kepada Masyarakat Lektor Kepala (PkMLK) Tahun 2026 dengan SPK Nomor: 634/DST/PL3.14/B/PM.01.03/2026; kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang selaku mitra kegiatan. Ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Bupati Sumedang atas sambutan dan arahan, serta kepada perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang telah menjadi narasumber pada sesi akses pembiayaan. Apresiasi juga disampaikan kepada para peserta kegiatan (pengusaha UMKM) serta tim PkMLK (dosen, staf administrasi, dan mahasiswa) yang sangat mendukung dan berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, S., Putri, F. K., Arang, D. F., Cholifiana, F., Langu, H. R. L. K. R., Putri, T. P., & Septiani, V. (2024). Systematic literature review: Implementasi SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(2), 87–99. <https://doi.org/10.55587/jla.v4i2.118>
- Barus, I. S. L., & Suharman, H. (2020). Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM tahun 2018 pada UKM sektor perdagangan di Kabupaten Bandung. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(2), 253–270. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i2.9104>
- Darmawan, D., Alamsyah, T. P., & Rosmilawati, I. (2021). Participatory Learning and Action untuk menumbuhkan quality of life pada Kelompok Keluarga Harapan di Kota Serang. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 5(2). <https://journal.unnes.ac.id/sju/jnfc>
- Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (DiskopUKMPP) Kabupaten Sumedang. (2024). Usaha mikro dominasi UMKM di Sumedang: Data NIB per Mei 2024. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/usaha-mikro-dominasi-umkm-di-sumedang>
- Dwi Handayani, Y., Yoshida, D., Pratiwi, R., & Ibrani, E. Y. (2025). Sosialisasi akuntansi UMKM berdasarkan SAK EMKM dalam meningkatkan produktivitas usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3527–3533. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1816>
- Evelyna, F., Rhamdhani, I. M., & Mahyuzar, H. (2025). Penerapan Participatory Action Research untuk meningkatkan strategi pemasaran UMKM alumni inkubasi Pemkab Kebumen. *JURPIKAT*, 6(4), 2050–2059. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i4.2562>
- Fitriana, A., Hasibuan, R. R., Tyas, Z. K., & Supriatin, D. (2022). Pendampingan pencatatan keuangan sederhana bagi pelaku UMKM bidang pariwisata di Desa Petahunan, Kabupaten Banyumas. *PakMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 17–22. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i1.787>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. <https://iaiglobal.or.id>
- Ilham, B. U., Enre, A., & Yusri, M. (2026). Peningkatan kapasitas kewirausahaan mahasiswa Universitas Cokroaminoto melalui program pendampingan di PLUT

- Sulawesi Selatan. Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat), 6(1), 24–27. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v6i1.1472>
- Khaddafi, M., Salsabila, A. A., Sagala, A., Anggraini, A. R., & Riani, I. (2025). Penerapan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM. *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 2(3), 137–144. <https://doi.org/10.61132/apke.v2i3.1400>
- Marliadi, R., Jamaludin, W. B., Nirwana, R., Jakiroh, J., Hilmi, R., & Mafazy, M. M. (2026). Optimalisasi pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM bagi pelaku usaha mikro. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 280–287. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v7i1.765>
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pasaribu, N. A., & Baroroh, N. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Semarang. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(1), 276–282. <https://doi.org/10.51903/p22z5232>
- Pratiwi, D., Suhartati, T., Nugroho, H., Tamimi, Y. A., Buntoro, A., & Windiarti, F. (2025). Transformation of UMKM accounting practices through education and guidance on private entity financial accounting standards. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 7(2), 302–308. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v7i2.2823>
- Prihastiwi, A. N., Badjuri, A., & Lisiantara, G. A. (2026). Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM jasa cuci sepatu dan sandal COYS. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(4), 2400–2407. <https://doi.org/10.63822/d9vdcq26>
- Rivandi, M., Ananda, F., Meirina, E., Umar, D., & Putra, G. H. (2025). Perhitungan HPP secara praktis dan akurat dengan Excel: Solusi bagi pengusaha dapur tahu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)*, 5(2), 55–62. <https://doi.org/10.31004/abdira.v5i2.588>
- Romadhon, F., Perwitasari, A. W., Bariyah, T., Atikasari, A. D. N., Darmawan, A., & Maulana, F. (2025). UMKM naik kelas: Pendampingan perhitungan harga pokok produksi untuk optimalisasi keuntungan dan keberlanjutan usaha. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 9(6), 6786–6802. <https://doi.org/10.31764/jmm.v9i6.35477>
- Rosyidah, K. L., Ariningsih, S., & Wijayanti, R. (2022). Analisis penerapan SAK-EMKM pada pelaku usaha kecil, dan pelaku usaha menengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 27(1), 66–75. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.310>
- Shafira, S., Maulidina, M., Udhaty, K. D., Siregar, P. K. T., Miransyah, I. A., & Tambunan, Y. G. M. (2024). Pendampingan penentuan harga pokok produksi (HPP) dan harga jual pada UMKM Kecamatan Medan Amplas. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(12), 1267–1276. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i12.1746>
- Umar, D., Rivandi, M., Meirina, E., Kartika, E. D., Utami, H. Y., & Dewi, M. K. (2026). Revitalisasi pemahaman laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM Kerupuk Azizah Kota Padang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.61231/em5qp753>
- Watulfa, D. C., & Fithria, A. (2025). Optimalisasi pencatatan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM untuk mendorong kemandirian finansial. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(2), 592–602. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i2.23695>